

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN GOWA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum
(UIN) Alauddin Makassar



Oleh :

MUHAMMAD SYAHRUL
NIM.10500113036

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

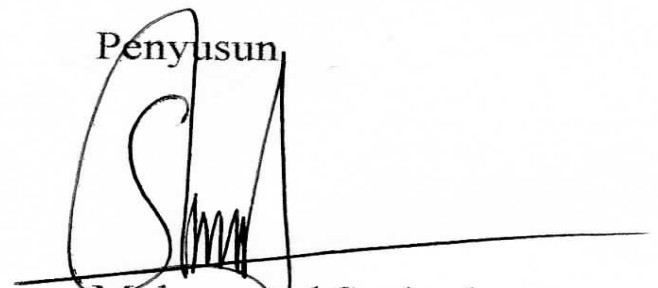
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syahrul
Nim : 10500113036
Tempat /Tgl. Lahir : Bunga Ejaya, 26 Agustus 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Kp. Daeng, Desa Bunga Ejaya, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa
Judul : Efektivitas Pelaksanaan PERDA Nomor 10 Tahun 2013
Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di kabupaten
Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya karenanya batal demi hukum.

Samata, 27 November 2017

Penyusun



Muhammad Syahrul

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa**”, yang disusun oleh Muhammad Syahrul, NIM : 10500113036, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 bertepatan dengan 10 Rabiul awal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan beberapa perbaikan.

Samata, 29 November 2017 M
10 Rabiul Awal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag (.....)

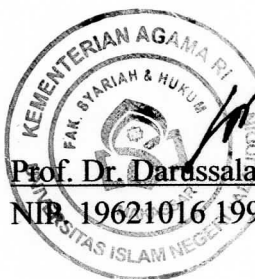
Munaqisy I : Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H (.....)

Munaqisy II : Ahkam Jayadi, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Jumadi, M.H. (.....)

Pembimbing II : Dr. Fadli A. Natsir, M.H. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIM 19621016 19903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas pelaksanaan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai *rahmatan li al-'alamin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi.

Saya sangat meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Jumadi,S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Fadli A. Natsif, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahkam Jayadi.,S.H.,M.H dan Bapak Ashabul Kahfi S.Ag.,M.H selaku Penguji yang senantiasa memberikan masukan dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa dan Jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan,

bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

8. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun. Serta keluarga besarku yang ada di Kabupaten Bone yang selalu memberikan dukungan yang terbaik.
9. Keluarga besar Ilmu Hukum A Angkatan 2013, Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
10. Keluarga besar Korps Sukarelawan Unit Markas PMI Kabupaten Gowa, kakanda-kakanda yang telah membagikan pengalamannya, *letting* serta adinda yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini
11. Keluarga KKN-R Angkatan 53 se-kecamatan Bajeng untuk partner terbaik saya Nur Annisa S.E yang tidak henti-hentinya memberikan pendampingan dalam penyelesaian skripsi ini.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Samata, 27 November 2017

Penyusun,

Muhammad Syahrul

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan.....	10
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	11-28
A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Nasional	11
1. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional	11
2. Teori – Teori Pendukung Pendidikan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan.....	13
B. Tinjauan Kelas Tuntas Berkelanjutan Menurut Perda No.10 Tahun 2013 Tentang Kelas Tuntas Berkelanjutan.....	18
1. Pengertian Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.....	18

2. Hak dan Kewajiban Pemangku Sistem Kelas Tuntas	
Berkelanjutan.....	23
3. Tata Laksana Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan	27
BAB III. METODE PENELITIAN	29-36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Metode Pendekatan.....	30
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Instrumen Penelitian	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
G. Pengujian Keabsahan Data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37-61
A. Implementasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Di	
Kabupaten Gowa.....	37
1. Landasan Yuridis SKTB	37
2. Landasan Padagogik SKTB	38
3. Implementasi Kebijakan SKTB Di Kabupaten Gowa	39
4. Pelaksanaan Sistem Promosi Otomatis (System Automatic	
Promotion dan Remedial)	42
5. Peranan Pemerintah Dalam SKTB.....	46
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan SKTB.....	49
1. Faktor Pendukung	49
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan SKTB	51

C. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Gowa	53
1. SKTB Terhadap Kualitas Guru	54
2. SKTB Terhadap Kualitas Siswa.....	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	62-64
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65-66
RIWAYAT HIDUP.....	67



ABSTRAK

Nama : Muhammad Syahrul
Nim : 10500113036
**Judul : Efektivitas Pelaksanaan PERDA Nomor 10 Tahun 2013
Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten
Gowa**

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa dan sejauh mana pengaruh PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Gowa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjutnya dideskripsikan dan diinterpretasi serta disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, angket atau kuesioner, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data secara online.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan SKTB ditingkatkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kab. Gowa dengan menggunakan *System Automatic promotion*, pada sistem ini tidak mengenal istilah tinggal kelas. Pada *System Automatic promotion* hanya mengenal istilah tuntas dan belum tuntas, dan bagi peserta didik yang belum tuntas akan diberikan remedial hingga tuntas, dan jika di akhir semester dan masih belum tuntas maka akan tetap bisa melanjutkan *study*, tetapi mata pelajaran yang belum tuntas tetap harus dituntaskan. Sistem pendidikan ini lebih mengedepankan edukasi dalam pelaksanaannya. 2) Dengan adanya PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan menjadi dasar atau acuan dalam pelaksanaan kebijakan SKTB. Baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi pengawasan, sehingga pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil angket dari 100 responden yang meliputi beberapa unsur pertanyaan mengenai dukungan, suasana, model pembelajaran, kondisi belajar, dan sistem proses belajar mengajar, menunjukkan angka yang tinggi. Namun demikian, terdapat unsur yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yakni pada suasana pembelajaran dan kedisiplinan.







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang serba moderen ini dimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang begitu pesatnya dan membawa perubahan pada hampir semua aspek kehidupan manusia yang permasalahannya hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat diperoleh melalui penguasaan dibidang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Dengan pendidikan peradaban manusia semakin maju, dari ketidak tahuan menjadi tahu sebagaimana di tegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5:


 أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ 
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 

Terjemahan :

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1(1)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca dan orang yang pertama yang menulis dengan memakai qalam atau pena ialah Nabi Idris a.s.²

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa :

1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai –nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat³

Sementara itu pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-

² Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Al-jalalain*, Pustaka Elba, Al-‘Alaq 96:4

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Pasal 3

undangan yang berlaku. Daerah sebagai desentralisasi pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan daerahnya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian direvisi kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 yang selanjutnya di undang – undangkan dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 menegaskan urusan wajib pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial menjadi tanggung jawab daerah yang harus mengurusinya.⁵

Salah satu tujuan wajib pemerintah daerah yaitu dalam hal pendidikan , hal ini sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan pembangunan dalam suatu daerah. Melalui sektor pendidikan ini daerah bisa berkembang, maju, kompetitif, dan sejahtera ketika dapat membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Kebijakan pendidikan dapat dijadikan skala prioritas dalam pembangunan suatu daerah yang nantinya akan mampu mencetak SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas mampu membawa daerahnya ke era persaingan baik itu dalam taraf nasional maupun global.

Dinamika perkembangan ekonomi yang digerakkan ilmu pengetahuan itu secara teknis disebut *knowledge driven economic growth*. Konsep ini menempatkan lembaga pendidikan pada posisi yang strategis sebab dapat (1) melahirkan tenaga- tenaga kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional, pakar , teknisi, dan manajer; (2) melahirkan ilmu pengetahuan baru

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12

dan menciptakan inovasi teknologi; (3) meningkatkan kemampuan mengakses perkembangan ilmu pengetahuan pada level global dan mengadaptasinya menurut konteks lokal (Bank Dunia, 2002).⁶ Maka sangat pentinglah sebuah inovasi kebijakan pendidikan dalam suatu daerah menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi ini.

Saat ini, Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan, salah satu kebijakan program pendidikan Bupati Gowa melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Gowa adalah SKTB. SKTB merupakan singkatan dari Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (*Automatic Promotion*),

SKTB disosialisasikan pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 dan pada 2013 dilaksanakan secara keseluruhan di semua tingkatan sekolah SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Sebagai langkah awal, SKTB dijalankan di beberapa sekolah percontohan tepatnya 50 sekolah untuk tingkatan SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa.

Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan untuk memajukan kualitas pendidikan dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan (SPKTB) adalah sebuah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang menekankan pada pelayanan pendidikan secara komprehensif dan tuntas anak didik, menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam belajar, memberikan pengalaman belajar yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, khusus anak didik di kabupaten Gowa.

⁶ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Intima, Jakarta, 2009, hal. 285

Kebijakan tersebut ditempuh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan menyadari bahwa sistem pendidikan, terutama pendidikan dasar adalah pondasi dari semua jenjang pendidikan yang ada, yang tersebar dari kota hingga pelosok desa terpencil seharusnya memiliki kekuatan dalam mengembangkan berbagai aspek kemampuan diri peserta didik untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang produktif. Juga disadari bahwa pendidikan dasar merupakan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya dan mengembangkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya. SKTB adalah kebijakan program pendidikan yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan.⁷

SKTB berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang hendak dicapai dengan SKTB adalah memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik, agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dan membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh.

Keunggulan sistem SKTB sendiri yaitu peserta didik belajar selalu dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas karena nasib mereka tidak ditentukan oleh Ujian Nasional dan tes yang mengukur kemampuan sesaat dan setiap peserta didik terjamin mendapatkan

⁷ Perda Kabupaten Gowa No.10 Tahun 2013, tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

haknya memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, selain itu peserta didik dapat lebih cepat menyelesaikan sistem kredit semester sehingga biaya yang dikeluarkan orangtua untuk keperluan pribadi dapat hemat.

SKTB ini menggunakan Sistem Promosi Otomatis (*System Outomatic Promotion*) yang merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas bagi para peserta didik yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia. Pada SKTB terdapat pula yang dinamakan pembelajaran remedial, pembelajaran remedial yang dimaksud adalah beberapa kompetensi yang belum dituntaskan dapat diulang tanpa harus mengulang semua kompetensi yang telah dituntaskan. Dampak dengan adanya penerapan SKTB dalam hal program tidak mengenal tinggal kelas bagi siswa dapat menyebabkan kualitas pendidikan semakin menurun, minat belajar siswa menjadi menurun apalagi siswa yang pada dasarnya sudah malas, keinginan untuk rajin ke sekolah juga berpengaruh karena sudah ada tertanam dalam pemikiran mereka adanya jaminan naik kelas, selain itu kualitas dan kreatifitas para guru juga berbeda-beda ada sehingga mempengaruhi dalam pencapaian keberhasilan SKTB.

Dalam penerapannya ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan SKTB yang belum terlaksana dengan baik yaitu berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Melanie Mulya S, *Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pelaksanaan SKTB di SD Inpres Cambaya)*, 2015.⁸ Beberapa guru kurang paham dan sering terhambat dalam penyusunan Rencana Penyusunan Pembelajaran (RPP), sehingga kemampuan dalam mengembangkan media dan bahan ajar menjadi lemah, selain

⁸ Mulya S, Mulyani.2015. ” *Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pelaksanaan SKTB di SD Inpres Cambaya)*”.(Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Administrasi) Makassar:Universitas Hasanuddin.

itu beberapa guru memiliki sifat malas dan kurangnya motivasi terkadang menyebabkan kurang maksimalnya persiapan dalam proses belajar.

Hal ini memberikan pengaruh terhadap kualitas siswa, karena guru memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan seorang siswa dan dalam mencapai keberhasilan program SKTB. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “ **Efektivitas Pelaksanaan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa**“..

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Skripsi ini berjudul ”Efektivitas Pelaksanaan PERDA Nomor 10 tahun 2013 Tentang Sistem kelas Tuntas Berkelanjutan”. Adapun fokus penelitian dari skripsi ini yaitu “ penerapan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas, maka Penyusun memberikan Deskripsi Fokus antara lain :

1. Efektivitas

Yang dimaksud dengan efektivitas dalam skripsi ini adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas yang pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai.

2. Pendidikan

Yang dimaksud dengan pendidikan dalam skripsi ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. SKTB (Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan)

Yang dimaksud dengan SKTB dalam skripsi ini adalah kebijakan program pendidikan pemerintah daerah kabupaten gowa yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan.⁹

4. Peraturan Daerah

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah dalam skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kepala Daerah baik di tingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam beberapa rumusan :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa ?
2. Sejauh mana tingkat efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan di kabupten Gowa?

⁹ PERDA Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013, Tentang kelas tuntas berkelanjutan, Bab I pasal 1(10)

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut :

1. Melanie Mulya S dalam skripsinya yang berjudul ,Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pelaksanaan SKTB di SD Inpres Cambaya), 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang SKTB sebagai sebuah terobosan baru atau inovasi baru dalam dunia pendidikan di Kabupaten Gowa, adapun perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat ialah dimana pada skripsi ini akan membahas mengenai sejauh mana efektifitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa.
2. Mety Silfitriana dalam skripsinya Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan(SKTB) di Kabupaten Gowa, 2016. Dalam skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan SKTB dan sejauh mana dampak dari kebijakan ini terhadap pendidikan di kabupaten gowa, adapun perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat ialah dimana pada skripsi ini akan membahas lebih kepada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai SKTB dan sejauh mana efektifitas pelaksanaannya sejak mulai di undangkannya
3. Nurwahid dalam penelitiannya Inovasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini membahas mengenai identifikasi jenis-jenis inovasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang diterapkan di Kabupaten Gowa, menganalisis level inovasi SKTB dan

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang diterapkan di Kabupaten Gowa.

E. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas , maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi atau melaksanakan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan terhadap pendidikan di Kabupaten Gowa

2. Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat baik itu masyarakat biasa maupun para penegak hukum terkait sistem kelas tuntas berkelanjutan. Adapun secara detail kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan ilmu hukum.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dan perangkatnya dalam menjalankan kebijakan SKTB agar dapat berjalan efektif.
- c. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji tentang kebijakan pendidikan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Nasional

1. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

a. Pendidikan

Pendidikan yakni satu sistem evaluasi untuk tiap-tiap individu untuk meraih pengetahuan serta pemahaman yang lebih tinggi tentang object spesifik serta khusus. Pengetahuan yang didapat secara resmi itu menyebabkan pada tiap-tiap individu yakni mempunyai pola fikir, tingkah laku serta akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.¹

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonsia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²

b. Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.³ Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan

¹ KBBI Online.

² Undang-undang Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1(2)

³ Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1(2)

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.⁴

Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi Pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan

⁴ Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1(3)

pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut , Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan 8 standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendidikan yaitu, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan , standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.⁵

Untuk mewujudkan standar pendidikan nasional tersebut , kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ditetapkan dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan. Dalam pelaksanaannya atau proses pembelajaran perlu diusahakan agar interaktif , inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

2. Teori Pendukung Pendidikan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan

a. Teori Pendidikan Progresivisme

Progresivisme menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Dalam konteks filsafat pendidikan progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan, bahwa

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2(1)

pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berfikir mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berfikir secara sistematis melalui cara-cara inilah seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan perbuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.⁶

Sedangkan progresivisme menurut Brubacher, sebagaimana dikutip Muhammad As Said “kemajuan” atau “progressive” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah, dan berarti “perubahan”. Perubahan memberi sesuatu yang baru harus benar-benar merupakan kenyataan dan bukan sekedar pemahaman terhadap realita yang sesungguhnya, sebelumnya memang sudah demikian.⁷

Progresivisme juga merupakan pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat:

1. Fleksibel (Tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh doktrin tertentu)
2. *Curious* (Ingin mengetahui, ingin menyelidiki)
3. Toleran dan *open-minded* (Mempunyai hati terbuka)

Aliran progresivisme memiliki sifat-sifat umum yaitu:

a. Sifat Negatif

Sifat itu dikatakan negatif dalam arti bahwa, progresivisme menolak otoritarisme dan absolutisms dalam segala bentuk, seperti misalnya terdapat dalam agama, politik, etika dan epistemologi.

b. Sifat Positif

Positif dalam arti, bahwa progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah dari manusia, kekuatan-kekuatan yang diwarisi oleh manusia

⁶ Muhmidayeli, *Filsafat Pendidikan Islam* (Pekanbaru: LSK2P, 2005), 161-162

⁷ As Said, *Filsafat Pendidikan*, 88

sejak ia lahir – *man's natural powers*. Terutama yang dimaksud adalah kekuatan manusia untuk terus-menerus melawan dan mengatasi kekuatan-kekuatan, takhayul-takhayul dan kegawatan-kegawatan yang timbul dari lingkungan hidup yang selamanya mengancam.

Progresivisme yakin bahwa manusia mempunyai kesanggupan-kesanggupan untuk mengendalikan hubungannya dengan alam, sanggup meresapi rahasia-rahasia alam, sanggup menguasai alam. Namun disamping keyakinan-keyakinan tersebut ada juga keyakinan dimana apakah manusia itu sendiri mampu belajar bagaimana mempergunakan kesanggupan itu, tetapi meskipun demikian *progresivisme* tetap bersikap optimis, tetap percaya bahwa manusia dapat menguasai seluruh lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.⁸

Dasar filosofis dari aliran *progresivisme* adalah *Realisme Spiritualistik* dan *Humanisme Baru*. *Realisme spiritualistik* berkeyakinan bahwa gerakan pendidikan progresif bersumber dari prinsip-prinsip spiritualistik dan kreatif dari Froebel dan Montessori serta ilmu baru tentang perkembangan anak. Sedangkan Humanisme baru menekankan pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai individu. Dengan demikian orientasinya individualistik.⁹

Ada beberapa pandangan filsafat *progresivisme*, antara lain :

1. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan menurut aliran *progresivisme* sebagaimana dikemukakan Dewey adalah menjadikan warga negara yang demokratis.

2. Kurikulum Pendidikan

⁸Rudiansyah, “Aliran-aliran Filsafat Pendidikan”, <http://tugasmakalah.blogspot.com/2012/06/aliran-progresivisme.html>, diakses tanggal 21 Mei 2017

⁹ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 144

Dalam bidang kurikulum, aliran progresivisme lebih mengutamakan bidang studi seperti fisika, sejarah, keterampilan, serta hal-hal yang berguna atau langsung dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.¹⁰

3. Metode Pendidikan

Metode pendidikan yang biasanya dipergunakan oleh aliran progresivisme diantaranya adalah :

- a. Metode Pendidikan Aktif, Pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- b. Metode Memonitor Kegiatan Belajar, Mengikuti proses kegiatan anak belajar sendiri, sambil memberikan bantuan-bantuan apabila diperlukan yang sifatnya memperlancar berlangsung kegiatan belajar tersebut.
- c. Metode Penelitian Ilmiah, Pendidikan progresif merintis digunakannya metode penelitian ilmiah yang tertuju pada penyusunan konsep.
- d. Pemerintahan Pelajar, Pendidikan progresif memperkenalkan pemerintahan pelajar dalam kehidupan sekolah dalam rangka demokratisasi dalam kehidupan sekolah.
- e. Kerjasama Sekolah Dengan Keluarga, Pendidikan Progresif mengupayakan adanya kerjasama antara sekolah dengan keluarga dalam rangka menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk mengekspresikan secara alamiah semua minat dan kegiatan yang diperlukan anak.

¹⁰ As Said, *Filsafat Pendidikan*, 91

f. Sekolah Sebagai Laboratorium Pembaharuan Pendidikan, Sekolah tidak hanya tempat untuk belajar, tetapi berperan pula sebagai laboratorium dan pengembangan gagasan baru pendidikan.¹¹

4. Pendidikan

Progresivisme di dasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anak bukanlah memfokuskan pada guru atau bidang muatan.¹² Dalam pendidikan progresivisme ini menekankan pada proses kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa dengan menjadikan siswa sebagai “subjek”, sehingga tolak ukur dalam proses pembelajaran di sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian maka aliran progresivisme menolak semua pandangan yang berasal dari aliran yang menjadikan siswa sebagai “objek” dari proses pembelajaran.¹³

5. Pelajar

Kaum progresiv menganggap subjek-subjek didik adalah aktif, bukan pasif, sekolah adalah dunia miniatur masyarakat besar, aktifitas ruang kelas difokuskan pada praktik pemecahan masalah, serta atmosfer sekolah diarahkan pada situasi yang kooperatif dan demokratis. Mereka menganut prinsip pendidikan perpusat pada anak (*child-centered*). Mereka menganggap bahwa anak itu unik. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri, mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan-harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa.¹⁴

6. Pengajar (guru)

Guru dalam melakukan tugasnya mempunyai peranan sebagai:

¹¹ Ibid., 146

¹² Usiono, *Pengantar Filsafat*, 144

¹³ As Said, *Filsafat Pendidikan*, 89

¹⁴ Mudyahardjo, *Pengantar*, 46-147

- a. Fasilitator, orang yang menyediakan diri untuk memberikna jalan kelancaran proses belajar sendiri siswa.
- b. Motivator, orang yang mampu membangkitkan minat siswa untuk terus giat belajar sendiri.
- c. Konselor, orang yang membantu siswa menemukan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap siswa. Dengan demikian guru perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa, dan teknik-teknik memimpin perkembangan siswa, serta kecintaan pada anak agar dapat menjalankan peranannya dengan baik.¹⁵

Jadi dalam aliran progresivisme hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang pendidik dalam proses pembelajaran adalah bagaimana memberikan kebebasan terhadap siswa dengan menjadikan siswa sebagai “subyek” dari proses pembelajaran. Bagi progresivisme cara demikianlah yang paling baik agar seorang siswa dapat berkembang secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau lingkungan dan meraih apa yang diinginkannya. Degan demikian maka bagi progresivisme pendidikanlah yang harus mengikuti apa kemauan siswa bukan siswa yang di kekang oleh aturan-aturan yang ada di sekolah, pendidikan juga harus mampu menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan siswa agar siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya demi kehidupan masa depan yang lebih baik.

B. Tinjauan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kelas Tuntas Berkelanjutan

1. Pengertian Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan

¹⁵ Ibid., 147

SKTB adalah kebijakan program pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada peserta didik melalui strategi penuntasan semua tagihan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran secara berkelanjutan.¹⁶ SKTB berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan yang hendak dicapai dengan SKTB adalah memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik, agar dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dan membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh.

Keunggulan sistem SKTB sendiri yaitu peserta didik belajar selalu dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur dan mampu mengembangkan kreativitas karena nasib mereka tidak ditentukan oleh Ujian Nasional dan tes yang mengukur kemampuan sesaat dan setiap peserta didik terjamin mendapatkan haknya memperoleh pendidikan dasar 9 tahun.

SKTB ini menggunakan Sistem Promosi Otomatis (*System Outomatic Promotion*) yang merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas bagi para peserta didik yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia. SKTB terdapat pula yang dinamakan pembelajaran remedial, pembelajaran remedial yang dimaksud adalah beberapa kompetensi yang belum

¹⁶ Perda Kabupaten Gowa No.10 Tahun 2013, tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

dituntaskan dapat diulang tanpa harus mengulang semua kompetensi yang telah dituntaskan.

Secara garis besar SKTB terbagi menjadi kelas tuntas berkelanjutan terbatas dan kelas tuntas berkelanjutan tidak terbatas.

1. SKTB Terbatas

Yaitu dilakukan pada setiap standar kompetensi yang kemudian mempunyai beberapa kompetensi dasar, ketika guru telah mengajarkan kompetensi dasar 1 kemudian melakukan evaluasi dengan syarat tuntas yaitu Kriteria Tuntas Minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh sekolah dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan memperoleh peserta didik yang tuntas dan kelompok peserta didik yang tidak tuntas. Kelompok peserta didik yang tuntas kemudian diberikan pengayaan (*enrichment*) sambil menunggu kelompok lain menuntaskan pembelajarannya. Bagi kelompok yang tidak tuntas diberikan pengulangan (*remedial*) setelah itu dilakukan evaluasi sampai semua kelompok yang tadinya tidak tuntas dapat menuntaskan kompetensi dasar tersebut. Setelah semuanya telah tuntas barulah dilanjutkan ke kompetensi selanjutnya.

2. SKTB Tidak Terbatas

SKTB tidak terbatas maksudnya adalah setelah peserta didik mempelajari suatu kompetensi kemudian dilakukan evaluasi. Ketika peserta didik telah melakukan evaluasi kemudian terdapat dua kelompok ada yang tuntas dan ada yang tidak tuntas. Maka kelompok yang telah berhasil tuntas dapat segera melanjutkan ke kompetensi berikutnya tanpa harus menunggu kelompok belum tuntas, sedangkan kelompok yang belum tuntas diberikan pengulangan (*remedial*) kemudian dilakukan evaluasi sampai mendapatkan ketuntasan, kemudian barulah dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya. Sehingga bagi kelompok peserta

didik yang dapat tuntas dengan cepat tidak terhambat oleh kelompok yang belum tuntas.

Secara operasional pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah setiap peserta didik.¹⁷

- a. Tuntas menyelesaikan kompetensi dasar sebagaimana dinyatakan dalam indikator.
- b. Tuntas menyelesaikan suatu mata pelajaran sesuai persyaratan yang dinyatakan dalam Kriteria Tuntas Minimal (KKM).
- c. Tuntas menyelesaikan mata pelajaran satu semester berdasarkan beban SKS.
- d. Tuntas menyelesaikan pembelajaran seluruh mata pelajaran pada kelas yang diikuti.
- e. Berkelanjutan mengikuti pelajaran pada kelas berikutnya walaupun ada mata pelajaran yang memenuhi KKM . Peserta didik tidak tinggal kelas dan mengulang seluruh mata pelajaran di kelas tersebut , tetapi menyelesaikan ketuntasan pada mata pelajaran yang belum memenuhi KKM pada waktu belajar dikels berikutnya.
- f. Berkelanjutan mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan diatasnya (SD/MI , SMP/MTs, SMA/SMK)

Secara teknis, penilaian ketuntasan dilakukan berdasarkan penguasaan seluruh indikator untuk suatu Kompetensi Dasar (KD) yang dinyatakan dengan nilai ulangan yang sama atau di atas nilai KKM. Apabila nilai yang diperolehnya sama atau di atas nilai KKM bagi suatu Standar Kompetensi, maka peserta didik tersebut melanjutkan pembelajarannya ke Standar Kompetensi berikutnya. Apabila nilai yang diperoleh sama atau lebih tinggi dari KKM untuk satu mata

¹⁷ Ayatollah Hidayat dan Ulfa Tenri Batari, *Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan*, Edukasi Mitra Grafika, Makassar, 2014, hal.15

pelajaran dalam satu semester maka peserta didik melanjutkan pembelajarannya ke semester berikutnya. Apabila nilai yang diperoleh seorang peserta didik dalam suatu ulangan harian lebih rendah dari nilai KKM, maka peserta didik harus mendapat bantuan sehingga yang bersangkutan mencapai nilai KKM atau di atasnya. Pemberian bantuan kepada peserta didik tersebut dilakukan guru dan diistilahkan sebagai pembelajaran remedial.

Setelah peserta didik mencapai nilai yang sama atau lebih tinggi dari KKM maka yang bersangkutan dapat melanjutkan pembelajarannya. Nilai KKM menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Dalam Pendekatan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan nilai KKM digunakan sebagai rujukan bagi guru untuk menentukan ketuntasan belajar seorang peserta didik. Penentuan ketuntasan belajar tersebut dilakukan sejak ulangan harian pertama berkelanjutan sampai akhir tahun pelajaran. Tujuan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan bertujuan :

1. Memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk menguasai semua kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta dirumuskan dalam nilai Kompetensi Kelas Minimal.
2. Memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pendidikan yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal dalam suasana belajar yang menyenangkan dan dapat menuntaskan pencapaian kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap kurikulum satuan pendidikan.
3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang dapat menuntaskan penguasaan semua kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran sebelum waktunya untuk diberikan kesempatan mengambil kompetensi dasar

berikutnya tanpa harus menunggu tahun pelajaran berikutnya/masa kenaikan kelas .

4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh (kecerdasan spritual, kecerdasan emosional (intrapersonal), kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial (interpersonal), kecerdasan spasial, kecerdasan berbahasa, kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik) untuk pembentukan kepribadian bermoral, sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; dan
5. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

SKTB diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, dan merupakan penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Sebagaimana materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.¹⁸

2. Hak dan Kewajiban Pemangku Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan

a. Pemerintah Daerah

¹⁸ Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 14

Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bupati kabupaten Gowa memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan sistem kelas tuntas berkelanjutan yaitu:¹⁹

- 1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.
- 2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak dan berkewajiban mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Dalam penyelenggaraan pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah wajib diketahui dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- 4) Mutasi dan penempatan Guru diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam penyelenggaraan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pemerintah Daerah kabupaten Gowa juga mempunyai hak dan kewajiban untuk membentuk dan menunjuk suatu lembaga untuk, peningkatan mutu pendidikan, evaluasi mutu pendidikan, dan sertifikasi guru.²⁰

Pemerintah daerah, dewan pendidikan, dari komite sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Hal ini dibenarkan pula oleh penanggung jawab SKTB Syarifuddin, M.Pd menyatakan bahwa :

“Peran pemerintah dalam pelaksanaan SKTB yaitu sebagai pembuat regulasi kebijakan, yaitu perpanjangan tangan dari pemerintah daerah

¹⁹ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pasal 8

²⁰ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pasal 9

melalui dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Gowa, selanjutnya melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan SKTB”.²¹

Sedangkan menurut Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan kependidikan

Djohar, menyatakan :

“Bentuk peranan pemerintah yaitu dengan mensosialisasikan SKTB ini mulai dari tingkat kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kecamatan hingga ke sekolah. Selain itu strategi yang dilaksanakan dalam SKTB yaitu dalam bentuk workshop, diklat, sosialisasi, pendampingan melalui tim pengembang SKTB yang di kawal oleh tim 11 juga didampingi oleh dewan pakar Pendidikan SKTB yang anggotanya dari berbagai perguruan tinggi dan direktorat kementerian sebagai suatu langkah yang bersinergi. Adapun pengawasan dilakukan oleh para pengawas sekolah. Pengawasan atau monitoring evaluasi juga dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kabupaten Gowa. Bentuk evaluasi dalam pelaksanaan SKTB ditentukan sesuai dengan hasil monitoring tiap-tiap satuan pendidikan, hasil monitoring dianalisis sebagai hasil evaluasi untuk kemudian dijadikan rujukan dalam menentukan tindakan atau upaya selanjutnya”.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa, bentuk peranan pemerintah dalam SKTB yaitu dengan melakukan sosialisasi dari tingkat kabupaten, setelah itu kecamatan, dan sekolah. Bentuk sosialisasinya dengan mengadakan workshop, namun tidak semua guru mengikuti kegiatan tersebut tapi ada perwakilan. Selain itu pemerintah juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SKTB.

b. Peranan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Selain itu, fungsi

²¹ Mety Silfitriana, 2016, EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB) DI KABUPATEN GOWA, hal.88

²² Mety Silfitriana, 2016, EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB) DI KABUPATEN GOWA, hal.88-89.

dewan pendidikan dan Komite Sekolah adalah memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan serta mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. Dalam pelaksanaan SKTB, menurut Pengelola dan Penanggungjawab SKTB Syarifuddin, menyatakan:

“Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan SKTB yaitu ikut serta dalam pemberian pengawasan dalam proses pendidikan di Kab.Gowa juga mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan dan membantu dalam melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa/masyarakat. Komite sekolah juga sebagai pendukung dana tapi dana tersebut tidak boleh berasal dari siswa / orang tua siswa, namun komite bisa mencari dukungan dana dari pihak lain namun itu pun sangat minim. Dengan adanya pendidikan gratis maka tidak boleh melakukan pemungutan dana kepada siswa”.²³

c. Peran Guru dalam SKTB

Keberhasilan kebijakan SKTB ini dalam pelaksanaannya sebenarnya sangat ditentukan oleh peranan kepala sekolah terlebih lagi seorang guru, karena merekalah yang terjun langsung dalam implementasi kebijakan ini. Guru dan kepala sekolah memiliki keterikatan yang sangat erat dan saling ketergantungan oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antar keduanya dalam mencapai keberhasilan. Pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan peserta didik dalam kelas. Menurut Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Djohar, mengatakan:

“Guru sebagai tulang punggung SKTB, sebagai pelaksana dilapangan karena merekalah yang langsung berhadapan dengan siswa dalam menerapkan sistem SKTB. Dalam artian tidak ada satu anakpun yang mengalami ketertinggalan pelajaran dalam setiap materi pelajaran, ketika itu terjadi maka guru berperan melakukan remedial dalam mencapai ketuntasannya”.²⁴

²³ Mety Silfitriana, 2016, EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB) DI KABUPATEN GOWA, hal. 90

²⁴ Mety Silfitriana, 2016, EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB) DI KABUPATEN GOWA, hal. 92

3. Tata Laksana Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan

Pelaksanaan kelas tuntas berkelanjutan pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan pendidikan bagi semua peserta didik yang memiliki kemampuan, kecepatan, maupun kualitas belajar berbeda-beda. Jadi dalam pelaksanaannya ada tata laksana yang telah menjadi komponen sistem kelas tuntas berkelanjutan meliputi:

a. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

b. Deteksi dini

Deteksi dini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru diawal pembelajaran setiap kali pertemuan dengan tujuan mendapatkan data dan informasi tentang minat, bakat, kompetensi, dan kreativitas setiap siswa terhadap setiap mata pelajaran.

c. Satuan kredit semester (sks)

Satuan kredit semester (sks) merupakan sistem penyelenggaraan program pendidikan dimana peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan.

d. Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Gambaran perkembangan belajar diperlukan disepanjang proses pembelajaran, dan penilaian tidak hanya dilakukan diakhir periode (semester), melainkan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran.

e. Remedial dan/atau klinik dini,

Remedial dan/atau klinik dini adalah pemberian bantuan pembelajaran secara berkesinambungan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mencapai standar kompetensi, dan kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu dengan tujuan memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan dengan prosedur remedial dan/atau klinik dini.

f. Pengayaan

Pengayaan dapat diartikan memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan difokuskan pada:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Tabel 3.1

Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Nama	Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
Alamat	Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa
Fax	0411-887344

Sumber : Website resmi Dinas Pendidikan Kab. Gowa, akses 22 September 2017

- b. Orang tua siswa
c. Siswa(i) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gowa

B. Metode Pendekatan

Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.

1. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
2. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti mengkaji tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan. Pendekatan penelitian tersebut juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang lain, sebagai peneliti pustakawan atau peneliti dokumen disebabkan peneliti ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. Sumber Data

1. Data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa ada perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :

a. Metode wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung informan untuk dimintai keterangan mengenai sesuatu yang diketahuinya, bisa mengenai suatu kejadian, fakta atau pendapat informan itu sendiri.

b. Metode observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.

1. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Angket (kuisisioner)

Kuisisioner atau angket merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan oleh peneliti program karena dipandang efektif dan efisien. Angket sangat cocok digunakan untuk responden yang jumlahnya sangat banyak serta wilayah penelitiannya sangat luas.

2. Teknik wawancara.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.¹ Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²

3. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.³ Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.⁴ Pada metode ini peneliti akan melakukan pengamatan pada proses masuknya perkara hingga selesainya perkara tersebut khususnya yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

4. Dokumentasi.

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat,

¹I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 37

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 186

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 142

⁴I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, h. 37

catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁵ Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi di Kepolisian Resort Kota Makassar.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian - baik secara akademik maupun logikanya⁶

Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁷

Selain dari pada itu, juga diperlukan instrument penelitian berupa:

1. Angket (Kuisisioner)

⁵Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), h. 127

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfa Beta,2009), h. 305

⁷Sugiono.2009.*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 306

Kuisisioner atau angket berfungsi sebagai alat untuk memperoleh data dari informan atau responden dalam jumlah banyak secara bersamaan.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.

3. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam peneletian ini, utamanya aplikasi Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara.

4. Alat Tulis

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak

hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan pemilahan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi *Credibility* (validasi internal), *Transferability* (validasi eksternal), *Dependability* (reabilitas), dan *Confirmability* (obyektivitas).

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas antara lain dilakukan dengan cara yaitu:⁸

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah atau tidak.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data yang telah ditemukan, seperti rekaman wawancara.

2. Pengujian Transferability

Pengujian Transferability merupakan validasi eksternal, digunakan agar hasil penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan dengan membuat laporan yang diurai secara jelas, rinci dan sistematis.

3. Pengujian Defendability

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012) h.37

Dalam penelitian kualitatif, uji defendability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian

4. Pengujian Confirmability

Dalam penelitian ini uji confirmability dilakukan bersamaan dengan uji defendability, karena pengujian ini harus melibatkan orang lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa

1. Landasan Yuridis SKTB

Dalam pelaksanaan SKTB didasarkan pada :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa , bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia , sehat berilmu , cakap , kreatif , mandiri , dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
- c. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu urusan pendidikan yang dilimpahkan menjadi wewenang pemerintah daerah kota/kabupaten dan propinsi.
- d. Peraturan daerah kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

2. Landasan Pedagogik SKTB

Pelaksanaan SKTB didasarkan pada landasan pendidikan sebagai berikut :

- a. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kualitas /kompetensi yang diharapkan masyarakat/bangsa
- b. Kualitas yang diharapkan bangsa terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab (Undang-Undang Pendidikan Nasional, pasal 3).
- c. Kualitas belajar peserta didik yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional ikembangkan dari proses pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun sebagai kualitas dasar manusia Indonesia dan lanjutan pada pendidikan menengah 3 tahun.
- d. Kualitas hasil belajar dalam pengetahuan yang dinyatakan dalam Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang selalu dapat diperbaiki dan ditingkatkan setiap saat baik pada waktu oleh peserta didik, baik pada kelas yang sama maupun di kelas sesudahnya.
- e. Kualitas belajar yang terkait dengan kemampuan , nilai, dan kebiasaan hanya dapat dikembangkan secara berkelanjutan dari kelas 1 (SD/MI) sampai minimal sampai tuntas wajib belajar 9 tahun.
- f. Peserta didik adalah subjek dalam belajar sehingga proses pendidikan harus menempatkan kepentingan belajar peserta didik sebagai yang utama. Oleh karena itu dalam proses belajar , peserta didik dibantu untuk mencapai kualitas yang dipersyaratkan dari posisi tidak/belum tahu, tidak/belum mau, tidak/belum mampu, ke posisi tahu, mau, dan mampu.

- g. Sesuai dengan prinsip pendidikan , pengukuran hasil belajar dilakukan untuk menemukan kesulitan belajar peserta didik pada satu titik waktu sehingga guru dapat memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kesulitan yang dihadapi.
- h. Kurikulum adalah kurikulum sekolah di setiap jenjang pendidikan, bukan kurikulum kelas.

3. Implementasi Kebijakan SKTB di Kabupaten Gowa

SKTB ini mulai disosialisasikan pada tahun 2011. Sebagai langkah awal pada tahun 2012 SKTB dijalankan di beberapa sekolah percontohan tepatnya 50 sekolah untuk tingkatan SD,SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Adapun sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai percontohan rujukan pelaksanaan SKTB adalah sebagai berikut.¹

Tabel 4.1
Sekolah Rujukan SKTB

No.	Sekolah
1	SDN Centre Mangalli
2	SDN Limbung Putra
3	SDN Limbung Putri
4	SDI Paccinongan
5	SDN Kalukuang

¹ Disdikgowa.com, diakses pada Kamis 10 Agustus 2017, 20:08

6	SDI Pa'bangian
7	SDN Doja
8	SDI Mangasa
9	SDI Sapaya
10	SDI Pattallassang
11	SDI Gentungan
12	SDI Bontosunggu
13	SDI Pare-Pare
14	SDC Malino
15	SDI Batangkaluku
16	SDN 2 Malino
17	SDN Paccinongan
18	SDN Bontokamase
19	SDI Lambengi
20	SDI Pa'bundukang
21	SDC Mawang
22	SDI Tanakaraeng
23	SDN Centre Malakaji

24	SDI Tetebatu
25	SDI Biringkaloro
26	SDI Bontokarampuang
27	SDN Panggentungan Selatan
28	SDI Pakatto
29	SDI Mannuruki
30	SDN Bontonompo
31	SDN Bontomanai Unggulan
32	SMPN 1 Sungguminasa
33	SMPN 2 Sungguminasa
34	SMPN 3 Sungguminasa
35	SMPN 1 Tinggimoncong
36	SMPN 1 Bontomarannu
37	SMAN 1 Parangloe
38	SMPN 4 Sungguminasa
39	SMPN 1 Bajeng Barat
40	SMPN 1 Bajeng
41	SMPN 1 Pallangga

42	SMPN 1 Tompobulu
43	SMPN 1 Tombolopao
44	SMAN 1 Bajeng
45	SMAN 1 Tinggimoncong
46	SMAN 1 Bontomarannu
47	SMAN 1 Sungguminasa
48	SMAN 2 Tinggimoncong
49	SMKN 1 Somba Opu
50	SMKN 2 Somba Opu
	Jumlah : 50 Sekolah

Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, 2017

Tabel diatas menunjukkan awal pelaksanaan SKTB yaitu dilaksanakan di 50 sekolah yang dijadikan sebagai rujukan SKTB. Pada tahun 2013 sistem ini benar-benar dijalankan di seluruh tingkatan sekolah dasar hingga menengah atas di Kabupaten Gowa tanpa terkecuali baik sekolah negeri dan swasta. Kemudian pada tahun 2017 hanya tigkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan sederajat yang diberlakukan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di kabupaten Gowa. Hal ini disebabkan karena Sekolah Menengah Atas dan sederajat berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi.

4. Pelaksanaan Sistem Promosi Otomatis (*System Outomatic Promotion*) dan Remedial

Kebijakan SKTB dalam pelaksanaannya menggunakan Sistem Promosi Otomatis (*System Outomatic Promotion*) yang merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas bagi para peserta didik yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia. Pada SKTB terdapat pula yang dinamakan pembelajaran remedial, pembelajaran remedial yang dimaksud adalah beberapa kompetensi yang belum dituntaskan dapat diulang tanpa harus mengulang semua kompetensi yang telah dituntaskan.

Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Pembelajaran remedial yang dikembangkan adalah pembelajaran remedial berkelanjutan yang dimaksudkan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sejak awal. Setiap guru dituntut untuk senantiasa mencermati setiap siswanya yang mengalami kesulitan belajar sejak awal, sehingga dapat menentukan langkah antisipasi sebelum dilaksanakan ujian/ulangan.

Langkah yang ditempuh oleh guru dalam pemberian remedial berkelanjutan di KTB adalah:

- a. Menemukan masalah
- b. Mengidentifikasi permasalahan
- c. Analisis masalah
- d. Menentukan alternatif tindakan
- e. Menyusun rencana remedial
- f. Melaksanakan remedial
- g. Mengevaluasi hasil remedial
- h. Menindak lanjuti hasil remedial

Setelah dilakukan langkah- langkah diatas namun terdapat peserta didik yang tidak mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Maka pendidik dapat memberikan perlakuan berupa:

- a. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan cara penyederhanaan materi.
- b. Pemberian bimbingan secara khusus, memberikan bimbingan perorangan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan.
- c. Pemberian tugas-tugas secara khusus, dalam rangka menerapkan prinsip pengulangan tugas-tugas khusus perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam belajar.
- d. Pemanfaatan tutor sebaya, tutor sebaya adalah teman sekelas yang memiliki kecakapan yang lebih dapat dimanfaatkan dalam membantu temanya yang masih kesulitan.

Dengan adanya upaya remedial diatas maka diharapkan dapat membantu Siswa menuntaskan semua mata pelajaran. Dan jika ada mata pelajaran yang tertinggal, setiap peserta didik tidak akan tinggal kelas, dan melanjutkan pelajarannya di kelas baru pada tahun ajaran baru.

Hal ini juga di perkuat dengan adanya pernyataan dari Pengelola dan Penanggungjawab SKTB, Syarifuddin:

“Salah satu Substansi SKTB adalah tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas melalui pemberdayaan semua penyelenggara pendidikan baik dari segi kebijakan berdasarkan perda No.10 tahun 2013. Semua dioptimalkan termaksud sisi pembiayaan maupun ketenagaan guru dan semua stakholder sehingga pada akhirnya di Gowa tidak ada siswa yang tinggal kelas lagi. Termaksud proses belajar mengajar, guru maksimal dengan mengandalkan kegiatan remedial secara terus – menerus sehingga tidak ada anak yang

tidak layak tinggal kelas , sehingga di akhir tahun semua memenuhi syarat untuk naik kelas”.²

Secara konsep SKTB merupakan upaya untuk membantu peserta didik untuk mencapai ketuntasan belajar. Untuk mencapai ketuntasan belajar tersebut dilakukan dalam proses pembelajaran dimulai diawal semester dan akhir semester atau awal tahun sampai akhir tahun, dan pada setiap pertemuan. Pada setiap pertemuan dilakukan penilaian hasil belajar dan diberikan remedial bagi mereka yang belum mencapai ketuntasan dalam menguasai kompetensi untuk pertemuan tersebut. Pemberian remedial dapat dilakukan secara individual, kelas, dan kelompok.

Hal ini dijelaskan pula oleh pernyataan dari Kepala Seksi Pembinaan Ibu Ulfa Tenri Batari :

“SKTB menganut paham tidak mengenal istilah tinggal Kelas, jadi SKTB ini menggunakan *System Outomatic Promotion* , jadi hanya mengenal kata tuntas dan belum tuntas, untuk tuntas dan belum tuntas itu maka, proses pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, sampai UPTDnya itu sendiri menggunakan sistem pembelajaran moduler, tapi kurikulum yang dianut tetap kurikulum 2013 dan Tingkat satuan pendidikan, dan jikapun ada siswa atau peserta didik yang tidak tuntas dalam kompetensi dasar atau indikator itu diberikan remedial, jadi SKTB ini sejalan dengan pendidikan inklusif”.³

Peneliti menyimpulkan pelaksanaan SKTB dengan menggunakan sistem promosi otomatis (*System Outomatic Promotion*) dan pemberian remadial, merupakan salah satu langkah pemerintah membantu peserta didik dalam menuntaskan waktu belajar dan pelajaran yang diberikan, juga tidak mengenal lagi istilah tinggal kelas, dan pada akhirnya dengan adanya SKTB semua siswa naik kelas diakhir semester.

² Syarifuddin (45) Pengelola Dan Penanggung Jawab SKTB, wawancara 08 Agustus 2017

³Ulfa Tenri Batari (31) Kepala Seksi Pembinaan, wawancara 08 Agustus 2017

5. Peranan Pemerintah dalam SKTB

Dalam pelaksanaan SKTB ini peranan setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya baik itu pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan dan guru sangat menentukan dalam mencapai tujuan dalam kebijakan ini.

a. Peranan Dinas Pendidikan

Berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten Gowa tentang SKTB pada pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah adalah:

“(1)Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (2)Pemerintah daerah sesuai kewenanganya berhak dan berkewajiban mengatur, merencanakan,melaksanakan,dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pendidikan.”⁴

Hal ini dibenarkan oleh Pengelola dan Penanggung jawab SKTB Syarifuddin, menyatakan bahwa :

“Peran pemerintah dalam pelaksanaan SKTB yaitu sebagai pembuat regulasi kebijakan, yaitu perpanjangan tangan dari pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Gowa, selanjutnya melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan SKTB”.⁵

Sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Pembinaan Ulfa Tenri Batari :

“Salah satu bentuk peran pemerintah adalah pengawasan dan evaluasi maka dari itu dibuatlah Peraturan Daerah untuk memperkuat peranan pemerintah untuk melakukan pengawasan, dalam hal ini telah dibentuk sebuah team pengawasan yang diambil dari guru dan kepala sekolah yang berkompeten, untuk melakukan pengawasan dan evaluasi diseluruh

⁴ Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjuta, pasal 18(1),(2)

⁵ Syarifuddin (45) Pengelola Dan Penanggung Jawab SKTB, wawancara 08 Agustus 2017

sekolah tingkat SD dan SMP team ini berjumlah 50 orang dan di SKkan oleh Bupati, team ini dinamakan Team 50.⁶

Sedangkan menurut Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan kependidikan Djohar menyatakan :

“Bentuk peranan pemerintah yaitu dengan mensosialisasikan SKTB ini mulai dari tingkat kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kecamatan hingga ke sekolah. Selain itu strategi yang dilaksanakan dalam SKTB yaitu dalam bentuk workshop, diklat , sosialisasi , pendampingan melalui tim pengembang SKTB yang di kawal oleh tim 11 juga didampingi oleh dewan pakar Pendidikan SKTB yang anggotanya dari berbagai perguruan tinggi dan direktorat ke mentrian sebagai suatu langka yang bersinergi. Adapun pengawasan dilakukan oleh para pengawas sekolah. Pengawasan atau monitoring evaluasi juga dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kabupaten Gowa. Bentuk evaluasi dalam pelaksanaan SKTB ditentukan sesuai dengan hasil monitoring tiap-tiap satuan pendidikan, hasil monitoring dianalisis sebagai hasil evaluasi untuk kemudian dijadikan rujukan dalam menentukan tindakan atau upaya selanjutnya”.⁷

Peneliti menyimpulkan, bentuk peranan Dinas Pendidikan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten Gowa, dalam hal ini pelaksanaan SKTB yaitu melakukan sosialisasi disemua tingkatan. Salah satu bentuk sosialisasi dari pemerintah ialah dengan mengadakan workshop. Tetapi dalam hal ini pemerintah juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SKTB, tugas pengawasan ini dilakukan oleh sebuah team yang diberi nama team 50 yang di SKkan oleh Bupati.

b. Peranan Guru dalam SKTB

Guru menurut undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

⁶ Ulfa Tenri Batari (31) Kepala Seksi Pembinaan, wawancara 08 Agustus 2017

⁷ Djohar (35) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan, wawancara 10 Agustus 2017

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁸

Keberhasilan kebijakan SKTB ini dalam pelaksanaannya sebenarnya sangat ditentukan oleh peranan kepala sekolah terlebih lagi seorang guru, karena merekalah yang terjun langsung dalam implementasi kebijakan ini. Guru dan kepala sekolah memiliki keterikatan yang sangat erat dan saling ketergantungan oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antar keduanya dalam mencapai keberhasilan. Pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan peserta didik dalam kelas.

Menurut Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Djohar, mengatakan:

“Guru sebagai tulang punggung SKTB ,sebagai pelaksana dilapangan karena merekalah yang langsung berhadapan dengan siswa dalam menerapkan sistem SKTB. Dalam artian tidak ada satu anakpun yang mengalami ketertinggalan pelajaran dalam setiap materi pelajaran , ketika itu terjadi maka guru berperan melakukan remedial dalam mencapai ketuntasanya”.⁹

Kepala sekolah selain harus memiliki hubungan yang baik dengan guru dan peserta didik, juga harus membangun komunikasi dengan orangtua siswa. Orangtua dapat menjadi partner yang baik untuk kesuksesan sekolah. Dukungan dan dorongan terhadap program-program sekolah dapat diperoleh dari orangtua. Menurut Muh. Suherwin Guru SMP Negeri 2 Sugguminasa mengatakan:

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 1

⁹ Djohar (35) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan, wawancara 10 Agustus 2017

“Dalam SKTB motivasi dan kinerja guru yang utama, ketika motivasi dan keinginan seorang guru lemah maka dapat menghambat dalam pencapaian tujuan dari SKTB, selain itu dukungan orangtua juga sangat penting namun masih ada orangtua acuh tak acuh terhadap adanya SKTB”.¹⁰

Penulis menyimpulkan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan peran dari jajaran guru yang mendapat dukungan dari orangtua siswa menjadi ujung tombak dikarenakan merekalah yang bersentuhan langsung dengan siswa. Jadi berhasil tidaknya pelaksanaan SKTB disekolah bergantung pada guru bagaimana kinerja dan pemberian motivasinya kepada siswa dan juga peran orangtua sangat dibutuhkan sebagai partner guru di rumah.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan SKTB

Dalam pelaksanaan sistem kelas tuntas berkelanjutan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SKTB yaitu:

1. Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung pelaksanaan SKTB diantaranya :

- a. SKTB telah menjadi program daerah dengan adanya peraturan daerah No. 10 Tahun 2013. Menurut Syarifuddin, pengelola dan penanggungjawab SKTB mengatakan:

“Dari segi regulasi pemerintah daerah dengan adanya Peraturan Daerah No.10 Tahun 2013 yang dimana SKTB sudah menjadi program daerah yang telah dijalankan pada tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA baik itu negeri dan swasta sebelumnya sampai keluarnya kebijakan Pemprov untuk menarik SMA sederajat ke Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga hanya diberlakukan pada tingkat SD dan SMP tanpa terkecuali.”¹¹

¹⁰ Muh. Suherwin (27) Guru SMPN 2 Sungguminasa, wawancara 15 Agustus 2017

¹¹ Syarifuddin (45) Pengelola Dan Penanggung Jawab SKTB, wawancara 08 Agustus 2017

Hal ini dibenarkan dengan pernyataan dari Muh. Suherwin Guru SMP Negeri 2 Sungguminasa

“SKTB ini telah menjadi program pemerintah daerah jadi setiap sekolah harus melaksanakannya, dimana sekolah telah menyiapkan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan SKTB”.¹²

Kepala sekolah SD Negeri Paccinongan Unggulan mengatakan:

“Kebijakan SKTB ini telah berlaku di semua sekolah di Kabupaten Gowa, terlebih lagi kebijakan ini telah memiliki peraturan daerah dan telah menjadi program daerah Kabupaten Gowa, dimana semua sekolah harus melaksanakannya.”¹³

- b. Respon *stakholder* pendidikan seperti sekolah merespon dengan baik Adanya respon dari sekolah baik itu guru dan siswa dalam pelaksanaan SKTB. Berdasarkan Pernyataan dari guru SMP Negeri 2 Sungguminasa

Muh. Suherwin mengatakan:

“Sistem ini sangat bagus, karena terdapat penguatan pada proses pembelajarannya diantaranya deteksi dini, klinik dini, remedial dan pengayaan. Ke empat komponen ini yang memperkuat pelaksanaan SKTB, selain itu SKTB mengakui adanya keberagaman atau perbedaan individu, yaitu mengakui adanya peserta didik yang cepat dan lambat dalam memahami pelajaran, dalam SKTB juga terdapat Sistem Kredit Semester (SKS), sehingga peserta didik dapat melakukan percepatan dalam studinya”.¹⁴

- c. Mendapatkan dukungan dari masyarakat/orangtua siswa

Kebijakan SKTB Ini dalam pelaksanaanya telah mendapat dukungan dari masyarakat Gowa, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khaerul yang merupakan orangtua siswa mengatakan:

“Kami mendukung kebijakan ini, karena kami sebagai orang tua siswa tidak perlu was-was lagi berkaitan dengan tinggal kelas, namun disini

¹² Muh. Suherwin (27) Guru SMPN 2 Sungguminasa, wawancara 15 Agustus 2017

¹³ Kepala Sekolah SD Negeri Paccinongan Unggulan, wawancara 10 Agustus 2017

¹⁴ Muh. Suherwin (27) Guru SMPN 2 Sungguminasa, wawancara 15 Agustus 2017

guru harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Dalam satu kelas pasti ada seorang siswa yang kurang dalam kelas, jadi disini sangat dituntut kemampuan seorang guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa yang kurang ini, karena di sistem ini semua siswa harus tuntas dalam pembelajarannya”.¹⁵

Hasil wawancara lainnya dengan orangtua siswa ibu Astuti mengatakan:

“Sistem ini bagus dimana anak/siswa tidak lagi tinggal kelas jadi mereka dapat lulus dengan waktu yang tepat. Namun, saya sebagai orangtua siswa selalu mengingatkan kepada anak saya harus tetap selalu belajar untuk bekal ke perguruan tinggi”.¹⁶

Menurut ibu Hafsah sebagai orangtua siswa mengatakan:

“Kami mendukung program ini karena program ini menuntut seorang guru jauh lebih peduli kepada siswanya, tapi kita juga orangtua tak lupa harus membimbing anak di rumah.”¹⁷

2. Faktor penghambat pelaksanaan SKTB

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam implementai SKTB yaitu:

- a. Pemahaman sebagian masyarakat yang masih bervariasi terhadap kebijakan SKTB ini. Masih adanya beberapa masyarakat yang tidak setuju

¹⁵ Khaerul (37) Orang tua Siswa, wawancara 18 Agustus 2017

¹⁶ Astuti (23) Orang tua Siswa, wawancara 18 Agustus 2017

¹⁷ Hafsah (30) Orang tua siswa, wawancara 18 Agustus 2017

terhadap kebijakan ini, menganggap kebijakan ini sangatlah menguntungkan bagi siswa apalagi bagi siswa yang malas. Hal ini juga dibenarkan oleh Guru SMP Negeri 2 Sungguminasa Muh. Suherwin mengatakan :

“Pemahaman masyarakat sebagian masih keliru, dengan adanya pemikiran negatif berkaitan dengan SKTB walaupun siswa malas akan tetap naik kelas hal ini menghambat dalam pelaksanaan SKTB”.¹⁸

- b. Masih Kurangnya kesadaran orangtua siswa, hal ini menghambat implementasi SKTB dalam pencapaian tujuannya. Peran orangtua sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan ini terlebih lagi dalam mendukung dan membimbing anaknya agar dapat lebih baik atau mengalami peningkatan belajar. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala seksi

Pembinaan Ulfa Tenri Batari mengatakan:

“Faktor Penghambat dalam SKTB salah satunya adalah masih terdapatnya orangtua siswa yang belum memahami sepenuhnya hakikat dari SKTB itu sendiri . Ada beberapa orangtua yang karena adanya SKTB apatis tidak peduli lagi dan menyerahkan semuanya kepada pihak sekolah. Padahal peran orangtua sangat besar dalam mendukung dan membantu keberhasilan SKTB ini”.¹⁹

- c. Masih kurangnya respon dan pemahaman tentang SKTB baik dari guru itu sendiri dan masyarakat. Hal ini dibenarkan Pengelola dan

Penanggungjawab Syarifuddin, SKTB juga mengatakan :

“Tidak semua guru dan masyarakat merespon kebijakan ini masih terdapat pro dan kontra didalamnya. Selain itu kompetensi guru yang bervariasi sehingga memberikan pemahaman yang bervariasi juga terhadap program ini, ada yang merespon secara antusias dan ada juga yang merespon secara apatis. Hal ini menghambat sistem ini”.(Wawancara,10 Agustus 2017)

Wawancara dengan salah satu guru SMP Negeri 3 Palangga mengatakan:

“Kami masih belum memahami secara menyeluruh mengenai SKTB, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan teknisnya dilapangan. Apalagi berkaitan dengan pembagian waktu. Dimana dalam SKTB ini siswa

¹⁸ Muh. Suherwin (27) Guru SMPN 2 Sungguminasa, wawancara 15 Agustus 2017

¹⁹ Ulfa Tenri Batari (31) Kepala Seksi Pembinaan, wawancara 08 Agustus 2017

betul-betul harus dibimbing apalagi bagi mereka yang remedial. Terkadang kami sulit pada saat membagi waktu dimana jam pelajaran juga padat disamping itu diperlukan bimbingan yang khusus bagi mereka yang remedial.

- d. Kesadaran siswa yang masih kurang, ini merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan SKTB, dimana masih terdapat beberapa siswa yang memiliki pemikiran bahwa dengan adanya program ini akan menguntungkan mereka walaupun mereka tidak belajar dengan baik, mereka akan tetap naik kelas. Terdapat juga beberapa siswa yang malas sehingga hal inilah yang dapat menghambat pelaksanaan SKTB. Hal ini juga dibenarkan guru SMP Negeri 3 Pallangga yang mengatakan:

“Ada beberapa siswa merasa bahwa program ini menguntungkan bagi mereka, sehingga menyebabkan beberapa diantara mereka mulai santai. Terkadang guru ingin memberikan remedial namun siswa tersebut yang malas untuk datang, hal inilah yang biasanya menjadi kendala kami”.

- e. Masih kurangnya sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaan SKTB masih terdapat sekolah yang masih memiliki sarana dan prasarana yang masih minim. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pallangga:

“Guru sudah menjalankan tugas dengan baik, namun kendalanya beberapa persen siswa ada yang malas karena faktor lingkungan dan dorongan orangtua yang masih kurang, serta sarana sekolah yang masih minim. Guru mau menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk memancing minat belajar siswa, namun sarana yang kurang maka hal ini biasanya menjadi kendala bagi kami”.

C. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan di kabupaten Gowa

Setelah melihat implementasi dari SKTB , sekarang kita akan melihat sejauh mana efektivitas penerapan dari sistem kelas tuntas berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan di kabupaten Gowa.

1. SKTB Terhadap Kualitas Guru

Adanya SKTB membuat seorang guru harus lebih meningkatkan atau lebih bekerja keras lagi terhadap siswanya, karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada seorang guru.

Menurut Kepala seksi Pembinaan Ulfa Tenri Batari mengatakan

“Dengan adanya SKTB guru semakin ekstra , guru lebih dituntut untuk lebih ekstra perhatian terhadap siswanya , sehingga guru dan siswa semakin bersinergi”.²⁰

Sedangkan menurut Kepala Sekolah SD Inpres Pallangga mengatakan:

“Setelah adanya SKTB terjadi peningkatan kualitas, ada perbedaan untuk seorang siswa harus lebih diperhatikan lagi karena adanya tuntutan pemerintah, dengan adanya SKTB membuat guru lebih bekerja keras lagi atau guru lebih sibuk dibandingkan sebelum adanya SKTB”.

Hal lainnya dikatakan oleh Guru wali kelas VI SD Inpres Pallangga :

“Dengan adanya SKTB, kami terus-menerus memberikan dorongan dan menasehati siswa ketika ada siswa yang malas, agar mereka lebih giat lagi belajar walaupun adanya sistem ini, karena sistem ini berupaya menuntut peran guru agar siswa benar-benar tuntas dalam belajar”.

Berdasarkan wawancara dengan guru SMP Negeri 2 Sungguminasa mengatakan:

“Kami sebagai guru setelah adanya SKTB lebih bekerja keras lagi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, ketika ada siswa yang malas kami sebagai guru yang mencarinya, apalagi ketika siswa tersebut remedial kami yang harus, kita harus memberikan perhatian yang lebih terhadap siswa tersebut”.

²⁰ Ulfa Tenri Batari (31) Kepala Seksi Pembinaan, wawancara 08 Agustus 2017

Semakin besarnya tantangan seorang guru dalam melakukan prosese belajar mengajar maka dibutuhkan kualitas dan kreatifitas guru dalam kelas. Untuk melakukan peningkatan kualitas guru dalam proses belajar mengajar pemerintah dalam hal ini Dinas pendidikan kabupaten gowa melaksanakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan tehnik kepada guru agar guru semakin kreatif dalam memberikan pelajaran. Hal ini dinyatakan oleh Kepala seksi Pembinaan Ulfa Tenri Batari :

“Peran seorang Guru dalam pelaksanaan SKTB sangatlah penting, sehingga seorang guru dituntut memiliki kualitas, dan pemahaman mengenai SKTB. Untuk itu Dinas Pendidikan melaksanakan Pelatihan-pelatihan dan bimbingan tehnik kepada guru-guru agar kualitas mereka dapat meningkat”²¹

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Muh. Suherwin Guru SMP Negeri 2 Sunguminasa yang mengatakan :

“Dengan adanya pelatihan-pelatihan dan bimbingan tehnik yang sering diberikan kami semakin paham bagaimana melaksanakan tugas kami sebagai guru ditambah perbedaan model siswa zaman dulu dengan zaman sekarang jauh berbeda, sehingga menuntut kita sebagai guru harus lebih kreatif”.

Adanya SKTB ini menuntut Guru untuk bekerja keras lagi karena sistem ini tidak mengenal lagi tinggal kelas sehingga guru harus memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap siswa dalam mencapai ketuntasan. Kemudian dengan melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan tehnik yang diberikan kepada guru membuat semakin banyaknya guru yang sudah mulai mengenal media tamabahan dalam pemberia pelajaran

2. SKTB Terhadap Kualitas Siswa

²¹ Ulfa Tenri Batari (31) Kepala Seksi Pembinaan, wawancara 08 Agustus 2017

Dengan adanya peraturan daerah ini maka kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan ini berlaku di seluruh sekolah SD dan SMP di Kabupaten Gowa. Dimana kebijakan ini tidak mengenal lagi adanya siswa yang tinggal kelas, hal ini sangat mempengaruhi tingkat kelulusan siswa di kabupaten Gowa, selain itu dengan adanya SKTB ini siswa yang mempunyai kemampuan lebih dapat mempercepat penyelesaian studinya. Menurut Kepala Sekolah SDI Inpres Pallangga mengatakan :

“Dengan adanya SKTB siswa yang memiliki kemampuan yang lebih/pintar dapat menempuh pendidikan dalam waktu yang cepat, dan bagi siswa yang kurang atau belum mampu menyelesaikan kompetensinya akan mendapatkan perlakuan khusus agar dibimbing sampai mencapai ketuntasan”.²²

Hal yang sama di ungkapkan oleh guru SMP Negeri 3 Pallangga yang mengatakan:

“Dengan adanya SKTB, ujian nasional bukan lagi penentu dalam melanjutkan studi siswa, selain itu memfasilitasi anak-anak yang memiliki kemampuan cukup tinggi dapat menempuh pelajaran tidak lagi 6 semester atau dapat melakukan percepatan studi”.²³

Dengan adanya SKTB siswa dapat melakukan percepatan waktu dalam menempuh pendidikannya, hal ini memberikan dampak positif terhadap siswa yang betul-betul rajin dan bersungguh-sungguh dalam pembelajarannya di sekolah. Selain memberikan dampak positif terhadap percepatan waktu studi, juga dalam hal peningkatan kelulusan siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menuntaskan study dengan tepat waktu bagi siswa yang belum tuntas maka akan dilakukan remedial, dengan remedial yang dilaksanakan secara berulang-ulang maka akan merangsang siswa dan memacu minat belajar siswa untuk cepat menuntaskan studinya. Walaupun masih adanya siswa yang merasa diuntungkan

²² Kepala Sekolah SD Inpress Pallangga, 21 Agustus 2017

²³ Guru SMP Negeri 3 Pallangga, 15 Agustus 2017

dengan kebijakan ini dan membuat mereka kurang serius dan santai dalam pembelajaran tanpa memikirkan kualitas pembelajaran yang ada pada dirinya, selain itu dengan adanya kebijakan ini seperti adanya penekanan siswa harus tuntas walaupun ada diantara mereka belum mampu, disinilah dituntut peran guru yang harus bekerja keras dalam pelaksanaan SKTB ini bukan hanya melakukan peningkatan kelulusan tapi peningkatan kualitas. Seperti pernyataan seorang Mahasiswa Vikram Efendi salah satu alumni sekolah di Kab. Gowa:

“Waktu sekolah terdapat beberapa teman yang malas dalam belajar karena merasa diuntungkan dengan adanya kebijakan tidak mengenal lagi tinggal kelas, walaupun sebenarnya pemahaman itu keliru tapi kembali pada pribadi masing-masing bagaimana dalam menyikapi sesuatu misalnya kebijakan ini”.²⁴

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan ini efektif untuk mendongkrak tingkat kelulusan siswa dan membantu siswa untuk mempercepat penyelesaian studinya, dan bagi siswa yang belum tuntas maka akan diberikan remedial secara terus menerus agar siswa mendapatkan pelajaran lebih. Dengan melihat tingkat kelulusan yang dari tahun ketahun semakin meningkat di kabupaten gowa ini bisa menjadi gambaran bagaimana tingkat kualitas pendidikan kabupaten gowa semakin meningkat. Untuk lebih jelas mengukur sejauh mana pengaruh SKTB terhadap kualitas pendidikan di kabupaten gowa, dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Pertanyaan	Respon			
		Sangat mendukung	Mendukung	Kurang mendukung	Tidak mendukung
1.	Bagaimana pendapat anda dengan adanya kebijakan tidak ada	30%	33%	23%	14%

²⁴ Vikram Efendi (17) Alumni SMA Negeri 1 Pallangga, wawancara 20 Agustus

	sistem tinggal kelas ?				
	Total	100 %			
	Jumlah responden	100 Orang			
2.	Bagaimana menurut anda suasana pembelajaran dalam kelas ?	Sangat tenang	Tenang	Kurang tenang	Tidak tenang
		7%	51%	39%	3%
	Total	100 %			
	Jumlah responden	100 Orang			
3.	Bagaimana menurut anda mengenai model pembelajaran di sekolah ?	Sangat suka	Suka	Kurang suka	Tidak suka
		39%	50%	10%	1%
	Total	100 %			
	Jumlah responden	100 Orang			
4.	Bagaimana menurut anda tentang kedisiplinan di sekolah?	Sangat disiplin	Disiplin	Kurang disiplin	Tidak disiplin
		39%	40%	21%	0
	Total	100 %			
	Jumlah responden	100 Orang			
5.	Bagaimana	Sangat	Menarik	Kurang	Tidak

	menurut anda mengenai modul pembelajaran di sekolah ?	menarik		menarik	menarik
		37%	40%	22%	1%
	Total	100 %			
	Jumlah responden	100 Orang			

Sumber: Angket Penelitian Skripsi Muhammad Syahrul, 2017

Melihat respon siswa mengenai pelaksanaan SKTB di lingkungan sekolah menjadi salah satu tolok ukur untuk mengukur sejauh mana pengaruh SKTB terhadap pendidikan di kabupaten gowa. Berikut penjelasan tabel di atas:

1. Berdasarkan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas

Berkelanjutan, Pasal 1 ayat 11

“Sistem Promosi Otomatis (*System Automatic Promotion*) adalah merupakan sistem yang tidak mengenal tinggal kelas bagi peserta didik yang tidak berhasil menuntaskan kompetensi sesuai alokasi waktu yang tersedia”²⁵

Setelah dilakukan respon kepada 100 orang siswa mengenai dukungan terhadap sistem ini maka persentase respon adalah, 30 orang menjawab sangat mendukung, 33 orang menjawab mendukung, 23 orang menjawab kurang mendukung, 14 orang menjawab tidak mendukung. Melihat hasil respon tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, 63% dari 100 siswa menginginkan adanya Sistem yang tidak mengenal tinggal kelas.

2. Berdasarkan ketentuan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, pasal 4 salah satu tujuan Sistem kelas tuntas berkelanjutan ialah memberikan pelayanan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pembelajaran yang kondusif.²⁶ Untuk mewujudkan

²⁵ PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pasal 1 ayat 11

²⁶ PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pasal 4

hal tersebut maka seorang guru harus mampu membuat suasana kelas yang sangat kondusif atau tenang sehingga peserta didik dapat belajar dengan tenang. Dari hasil respon dari 100 siswa tentang bagaimana suasana pembelajaran dalam kelas, dimana 7 orang menjawab sangat tenang, 51 orang menjawab tenang, 39 orang menjawab kurang tenang, dan 3 orang menjawab tidak tenang. Dari jawaban tersebut peneliti menyimpulkan bahwa suasana proses pembelajaran sudah cukup tenang melihat 58% siswa merasakan suasana pembelajaran yang mendukung dan 42% masih merasakan suasana kurang mendukung.

3. Berdasarkan ketentuan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pasal 6 :

“Model pembelajaran Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan menekankan pada proses pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar dalam kondisi psikologis yang positif, percaya diri, jujur, dan mampu mengembangkan kreativitas.”²⁷

Setelah melakukan respon kepada 100 orang siswa mengenai model pembelajaran di sekolah, maka, 39 orang mengatakan sangat suka, 50 orang menjawab suka, 10 orang menjawab kurang suka, dan 1 orang menjawab tidak suka. Dari jawaban tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran yang diberikan sudah sangat baik, melihat persentase jawaban siswa dimana 89% siswa menganggap model pembelajaran menarik sehingga mereka suka ataupun sangat suka dan 11% menganggap kurang menarik ataupun tidak menarik.

4. Berdasarkan ketentuan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pasal 3

²⁷ PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pasal 6

“Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.²⁸

Dari fungsi diatas maka dibutuhkan sebuah kedisiplinan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas untuk mewujudkannya. Melihat respon dari 100 orang siswa, dimana 39 orang menjawab sangat disiplin, 40 orang menjawab disiplin, 22 orang menjawab kurang disiplin, dan 0 orang menjawab tidak disiplin. Dari respon tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, proses pembelajaran sudah sangat disiplin melihat 79% siswa menganggap disiplin ataupun sangat disiplin dan 22% siswa menganggap kurang disiplin.

5. Berdasarkan ketentuan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pasal 17 ayat 3

“(3)Modul Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri, untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.”

Dari respon 100 siswa 37 orang menjawab sangat menarik, 40 orang menjawab menarik, 22 orang menjawab kurang menarik, dan 1 orang menjawab tidak menarik. Melihat respon tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa modul pembelajaran sudah sangat menarik melihat respon 77% siswa menjawab menarik ataupun sangat menarik dan 23% menganggap kurang menarik ataupun tidak menarik.

²⁸ PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kelas Tuntas Berkelanjutan, Pasal 3

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Implementasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan menggunakan *System Automatic Promotion*, sistem ini tidak mengenal istilah tinggal kelas dan hanya mengenal istilah tuntas dan belum tuntas, kemudian untuk yang belum tuntas akan diberikan remedial secara terus menerus untuk membantu peserta didik untuk menuntaskan mata pelajaran yang ada. Jika pada akhir semester dan masih belum tuntas maka peserta didik tetap bisa melanjutkan studi dan tetap menyelesaikan kredit semester yang belum tuntas. SKTB disosialisasikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan SKTB dengan dilaksanakannya pada 50 sekolah rujukan SKTB dan pada tahun 2013 telah di PERDA kan ke dalam PERDA Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dan kemudian dilaksanakan secara keseluruhan disemua tingkatan sekolah SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa. Pada tahun 2017 tingkat SLTA sederajat tidak diberlakukan lagi SKTB, hal ini dikarenakan tingkat SLTA sederajat berada di bawah naungan Provinsi.
2. Dengan adanya PERDA Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan menjadi dasar atau acuan dalam pelaksanaan kebijakan SKTB. Baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi pengawasan, sehingga pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil angket dari 100 responden yang meliputi beberapa unsur pertanyaan mengenai dukungan, suasana, model pembelajaran, kondisi belajar, dan sistem proses belajar mengajar, menunjukkan angka

yang tinggi. Namun demikian, terdapat unsur yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yakni pada suasana pembelajaran dan kedisiplinan.

B. *Saran*

Dari hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran kepada Pemerintah kabupaten Gowa beserta unsur-unsur yang terkait dalam pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan diantaranya :

1. Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan SKTB ini lebih ditingkatkan dalam pengawalan dan pengawasannya di lapangan agar selain memberikan kenaikan tingkat kelulusan yang tinggi namun juga tetap memperhatikan kualitas.
2. Pemerintah perlu melakukan peningkatan dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah, karena dalam mencapai keberhasilan ini untuk menarik minat belajar siswa diperlukan sarana dan prasarana pendukung dalam pembelajaran
3. Guru sangat diperlukan dalam memotivasi diri dan siswanya untuk sadar dalam menjalankan kebijakan pendidikan ini bukan hanya memikirkan ketuntasan semata tetapi juga memikirkan bagaimana kualitas siswanya.
4. Guru juga harus memberikan pengertian dan pemahaman yang jelas kepada peserta didik agar mereka paham hak dan kewajiban mereka sebagai peserta didik dalam pelaksanaan SKTB ini, sehingga tidak adalagi pemahaman-pemahaman yang membuat peserta didik malas dalam menyelesaikan studi.

5. Untuk para orangtua siswa dan masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini, apalagi orang tua siswa sangat diperlukan dalam memotivasi dan membimbing anaknya dalam belajar jangan menyerahkan secara total kepada pihak sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali,Mohammad. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Jakarta : Imtima, 2009
- As Said, *Filsafat Pendidikan*
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Tafsir al-jalalain*
- Hidayat,Ayatollah dan Ulfa Tenri Batari,*Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan*, Makassar : Edukasi Mitra Grafika,2014.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Kaho, Josef Riwu. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta:Center for Politics and Goverment (PolGov) Fisipol UGM. 2012.
- Louis, Gottschalk. *Understanding History; A Primer of Historical Method*.terjemahan Nugroho Notokusanto. Jakarta: UI Press.1998.
- Mazmanian, dalam Widodo. *Defenisi Implementasi Kebijakan*. Arena Kami. 2010.
- Mety Silfitriana, *Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupate GOWA*,2016
- Muhmidayeli, *Filsafat Pendidikan Islam*, Pekanbaru: LSFK2P, 2005
- Mulya S, Mulyani.2015. " *Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pelaksanaan SKTB di SD Inpres Cambaya*".(Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Administrasi).Makassar:Universitas Hasanuddin.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007
- Ndraha,Taliziduhu.*Kybernology, Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta:Rineka Cipta.2011.
- Naskah Akademik, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, *Automatic Promotion*, Dinas Pendidikan Gowa.
- Nurwahid, *Inovasi Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) Kabupaten Gowa*,Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar,2015.
- Panduan Khusus, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, *Automatic Promotion*, Dinas Pendidikan Gowa.
- Panduan Model Pembelajaran, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, *Automatic Promotion*, Dinas Pendidikan Gowa.

Panduan Umum, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, *Automatic Promotion*, Dinas Pendidikan Gowa.

PERDA Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013, Tentang kelas tuntas berkelanjutan, Bab I pasal 1(10)

Redja Mudyardjo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut hukum di Indonesia*. Jakarta: mitra wacana media.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, 2009.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan

Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006,

<http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>.

Rudiansyah, "Aliran-aliran Filsafat Pendidikan", <http://tugasmakalah.blogspot.com/2012/06/aliran-progresivisme.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa”**, bernama lengkap Muhammad Syahrul, Nim : 10500113036, lahir di Bunga Ejaya 26 Agustus 1995, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Mustafa dan Ibu Saniasa.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Inpres Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2002-2007, kemudian Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pallangga Kabupaten Gowa pada tahun 2007-2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pallangga, jurusan Produksi Grafika pada tahun 2010-2013. Dalam tahun yang sama yakni 2013, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur Seleksi Ujian SNMPTN dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum hingga tahun 2017.

Selama menyandang status mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, penulis aktif berkegiatan di luar kampus di KSR-Unit Markas PMI Kabupaten Gowa dengan menjabat sebagai Devisi Sekretariat dan Kesejahteraan pada tahun pada tahun 2014-sekarang. Penulis juga pernah menjadi ketua Seksi Pendidikan dan Penalaran pada Himpunan mahasiswa Gowa koordinatrat Pallangga periode 2016-2017.